

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata, terdapat keterlibatan beberapa factor dalam pelaksanaan sector pariwisata. Factor ini secara rinci diuraikan dalam peraturan tersebut diantaranya yaitu: 1) Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 3, 2) Masyarakat, yang diatur dalam pasal 65 No.1, 4) Pelaku Usaha, seperti disebutkan dalam Pasal 72, dan 5) Media, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 No. 20. Konsep ini diperkuat oleh Pasal 1 Ayat 34 yang menjelaskan bahwa kerangka kelembagaan di sector pariwisata terdiri dari berbagai komponen yang terorganisir, meliputi peran pemerintah, pemerintah daerah, Kota, Regulasi, Swasta, masyarakat, operasional, sumberdaya dan mekanisme berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan dampak positif untuk mencapai tujuan dalam bidang kepariwisataan.

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah mengembangkan suatu rencana strategis, sebuah dokumen perencanaan mencakup lima tahun anggaran dari tahun 2018 hingga 2023. Rencana strategis ini menetapkan dua tujuan utama, yakni: 1) Peningkatan aspek ekonomi kota, dan 2) meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja. Dalam upaya mencapai tujuan utama in, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah merumuskan empat sasaran strategis, yaitu 1) meningkatkan kualitas destinasi wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, 2) meningkatkan kemajuan budaya yang memberi kontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) mendorong peningkatan kreativitas dan daya saing pelaku serta pengusaha, dan 4) meningkatkan kualitas pelayanan public. Tujuan utama pertama direalisasikan melalui tiga strategi utama yang sejalan dengan arah dan kebijakan yang tercatat dalam Rencana Strategis Pemerintahan Kota Bandung 2018-2023 dibawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun anggaran yakni tahun 2018-2023 memiliki dua tujuan utama yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian kota dan 2) Meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mempunyai empat sasaran strategis untuk mencapai tujuan utama tersebut yaitu: 1) Peningkatan kualitas destinasi pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, 2) Peningkatan kemajuan budaya yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, 3) Peningkatan kreativitas dan daya saing pelaku dan pengusaha, 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan utama yang pertama dilaksanakan menggunakan tiga strategi pertama semua rangkaian ini sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertulis dalam buku Rencana Strategis 2018-2023 Pemerintahan Kota Bandung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemerintah Kota Bandung memiliki rencana perkembangan pariwisata yang terus didukung agar pengembangan pariwisata yang ada dapat berhasil dikembangkan sehingga sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah tentu harus membuat strategi dan kebijakan. Dalam mencapai tujuan butuh adanya strategi dan kebijakan terkait tentu pemerintah tidak akan berhasil dan tercapai

dengan sendirinya perlu implementasi terutama saat masa pandemic covid-19 Indonesia mengalami masalah di sektor pariwisata dan kota Bandung pun turut terdampak dengan adanya pandemic ini dikarenakan banyak wisatawan enggan berkunjung menuju kota besar dimana Kota Bandung sendiri termasuk yang mendapat lonjakan kasus yang signifikan.

Pariwisata yang berada dibawah wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam tahap pemulihan kondisinya setelah dihantam oleh Covid-19 pengelolaan destinasi wisata pun terus diperbaiki untuk kembali seperti sediakala namun dalam tahap pemulihan tersebut perlu adanya perencanaan yang melibatkan masyarakat yang berada disekitar area destinasi wisata dimana masyarakat. Selain itu juga melibatkan masyarakat sendiri dalam perencanaan meningkatkan kunjungan wisatawan, masyarakat dapat menjadi salah satu yang membantu dalam proses pemasaran destinasi wisata sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan upaya untuk menarik kembali wisatawan menuju Kota Bandung

Untuk merealisasikan tujuannya pada tahun anggaran 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung meluncurkan *Bandung Calendar of Event 2022* melalui website dan media sosial, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyelenggara dari lembaga pemerintah dan non pemerintah, di dalamnya terdapat beragam *event* yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Terdapat 64 *event* yang dirancang dan diaku sisi dengan 10 *event* unggulan diantaranya adalah; *Absolute Drumfest, Ganesh Film Festival, Bandung Independent Film Fest, Bandung Isola Performing Art Festival, World Music Contest "SORA III" Journey*

of Life, Keuken Bandung, Festival Asia Afrika, Bandung Photography Month, Bandung Kota Angklung, International Photography & Short Movie Festival.

Gambar 1. 1 *Bandung Calendar of Event 2022*



Sumber : disbudpar.bandung.go.id

Dari 64 event yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terdapat event yang rutin diadakan setiap tahunnya yakni Asia Africa Festival. Event ini merupakan salah satu perhelatan akbar yang ada di Kota Bandung yang rutin diadakan setahun sekali untuk memperingati Kofrensi Asia Afrika tahun 1955. Dalam festival menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya dan juga turut menggandeng sanggar dan seniman dari berbagai daerah menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya seperti tari-tarian tradisional selain itu ada juga pertunjukan pencak silat, tembang sunda, wayang dan pertunjukan menari lainnya serta event ini selalu dihadiri oleh negara sahabat yang berpartisipasi dalam gelaran akbar ini.

Pelaksanaan program ini mengandalkan peran utama Pemerintah Kota Bandung yang memiliki wewenang dalam mengawasi serta mengelola sector kepariwisataan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, dan pendaan. Dalam rangka menjalankan fungsinya-fungsinya dinas juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait. Pemangku kepentingan merujuk kepada individu maupun kelompok yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi pencapaian proyek dan tujuan organisasi melalui kontribusi satu sama lain. (Astuti, Warsono, 2020)

Sebelum pandemic festival ini selalu melibatkan ribuan orang namun pandemic covid-19 memaksa festival pada tahun 2022 digelar dengan peraturan dan protocol kesehatan yang berlaku salah satunya digelar secara *hybrid*, yakni luring dan daring. Oleh karena itu, pengunjung di lokasi acara pun dibatasi menyesuaikan kapasitas yang ada. Sehingga pada saat penyelenggaraan masyarakat tetap dapat menyaksikan secara langsung melalui youtube *This is Bandung* dan Instagram *@disbudpar.bdg*

Pemasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Festival Asia Afrika 2022 menjadi focus mendalam kebijakan yang diadopsi dalam Festival Asia Afrika 2022 mencangkup berbagai aspek untuk memastiikan acara yang sukses. Salah satu kebijakan utama adalah penggunaan metode hybrid yang menggabungkan format fisik dan virtual dalam pelaksanaan acara. Hal ini diambil sebagai respon atas kondisi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik. Selai itu kebijakan protocol kesehatan juga ditekankan dengan ketat termasuk penerapan Clean Health and

Environment (CHSE) untuk menjaga keamanan dan kesehatan. Kebijakan lainnya termasuk kerjasama lintas sector seperti kolaborasi dengan pihak hotel untuk aspek teknis dan penyediaan fasilitas.

Permasalahan terkait kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan juga menjadi hal yang perlu dicermati. Penyelenggaraan acara dalam skala besar seperti Festival Asia Afrika melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah, sector swasta, dan komunitas budaya. (Sun, 2016) Konflik kepentingan dan perbedaan tujuan diantara pemangku kepentingan dapat memengaruhi pelaksanaan acara dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu analisis mengenai bagaimana kolaborasi peran masing-masing pemangku kepentingan serta upaya untuk mengatasi potensi konflik menjadi aspek penting.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Alasan dari pemilihan lokasi ini adanya ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pelaksanaan program festival Asia Afrika dilakukan di Kota Bandung mengingat konferensi Asia Afrika sendiri pada tahun 1955 diadakan di Kota Bandung sehingga mendapatkan hak istimewa untuk melaksanakan event tersebut.

Penelitian yang biasanya dilakukan dalam sektor pariwisata lebih mengenai strategi pengembangan festival tersebut. Maka dari itu keunggulan dari penelitian ini lebih mendalami sejauh mana kebijakan program pengembangan destinasi pariwisata di Kota Bandung yang dilakukan oleh aktor pemerintah atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan yang dihadapinya, sehingga mampu untuk mengevaluasi kinerja dan penentuan langkah yang tepat kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis kemudian tertarik untuk membahas lebih lanjut berkenaan dengan strategi meningkatkan kunjungan wisatawan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan judul. “Strategi Implementasi Kebijakan Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Program Festival Asia Afrika 2022 ”pada penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa Pelaksanaan Festival Asia Afrika 2022 dilaksanakan secara hybrid karena kondisi situasi di tahun 2022 pandemi Covid-19. Pelaksanaan hybrid yakni kombinasi antara acara fisik dan virtual. Dengan adanya kebijakan baru ini tentu ada strategi baru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan menjawab tantangan tersebut karena pelaksanaan kegiatan model hybrid ini memberikan akses yang lebih luas meskipun demikian ada tantangan yang harus dihadapi seperti menjaga keaslian dan kualitas pagelaran.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana menentukan kebijakan, formulasi dan penyebaran kebijakan Festival Asia Afrika di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
2. Bagaimana kajian konteks social, politik, dan ekonomi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?

3. Bagaimana kepemimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
4. Bagaimana perilaku pemangku kepentingan dalam implementasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
5. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melaksanakan implementasi dan mobilisasi sumberdaya
6. Bagaimana operasi dan layanan yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?
7. Bagaimana umpan balik proses dan hasil dari kebijakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah di paparkan tersebut, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu

1. Untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan di Festival Asia Afrika tahun 2022 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
2. Untuk menganalisis konteks sosila, politik, dan ekonomi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
3. Untuk menganalisis kepemimpinan mengimplementasikan kebijakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
4. Untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan turut mengimplementasikan kebijakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

5. Untuk menganalisis perencanaan implementasi dan mobilisasi sumberdaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
6. Untuk menganalisis operasi dan layanan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
7. Untuk menganalisis feedback berdasarkan hasil dari kebijakan baru oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap pariwisata di Kota Bandung, serta memberikan pengetahuan baru bagi penulis, pembaca, serta berkontribusi bagi penelitian lainnya sebagai bahan referensi dalam pengkajian tentang pariwisata serta memberikan sumbangan berupa pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi Instansi, Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan program yang dilakukan setiap unit pelayanan yang diberikan kepada stakeholders yang nantinya sedikit demi sedikit akan diperbaiki sehingga pelayanan yang diberikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan maksimal di setiap programnya dan bagi pemerintah daerah khususnya hasil penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan untuk Festival Asia Afrika di masa mendatang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebuah penelitian diharuskan berpedoman pada teori yang relevan, dengan maksud agar penelitian tidak dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini digunakan tiga teori, yaitu :

Pertama, *Grand Theory* yang digunakan adalah teori administrasi publik. Mengutip Nicholas Henry dalam (Harbani Pasolong, 2019) mendefinisikan bahwa dalam (Pasolong, 2019) dibuku yang berjudul Teori Administrasi Publik “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi personel dan perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah”. Administrasi publik meliputi kegiatan organisasi termasuk didalamnya manajemen yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang dalam proses keberlangsungannya terdapat pengelolaan keuangan dan pengawasan terhadap asset dan barang pemerintah.

Kedua, *Middle Theory* digunakan yaitu kebijakan publik yang mana penulis mengambil teori Thomas R Dye dalam buku (Agustino & Leo, 2017) yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik. “Kebijakan publik ialah apapun yang dimana harus pemerintah kerjakan dan yang tidak dikerjakan.”

Ketiga, *Applied Theory*, teori yang digunakan peneliti adalah teori *Policy Implementation Assessment Tool*, menurut (Bhuyan, 2010) didefinisikan bahwa “Pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas kebijakan, merumuskan kebijakan dan arahan program, dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan secara keseluruhan. Pelaksana dan pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi”

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

